



**PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 110 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019**



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 110 TAHUN 2018.
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2019 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019.

- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab V : Penutup.

Padal 3

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
- e. Perubahan Renja Badan Daerah;
- f. Perubahan Renja Dinas Daerah;
- g. Perubahan Renja Kantor Daerah; dan
- h. Perubahan Renja Kecamatan.

- (2) Perubahan Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (3) Perubahan Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. Terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
- c. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- i. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- k. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 - m. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Perubahan Renja Dinas Perdagangan;
 - o. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan;
 - r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.
- (4) Perubahan Renja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Perubahan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Perubahan Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Perubahan Renja Kecamatan Srandakan;
 - b. Perubahan Renja Kecamatan Sanden;
 - c. Perubahan Renja Kecamatan Pajangan;
 - d. Perubahan Renja Kecamatan Sedayu;
 - e. Perubahan Renja Kecamatan Pandak;
 - f. Perubahan Renja Kecamatan Kasihan;
 - g. Perubahan Renja Kecamatan Bantul;
 - h. Perubahan Renja Kecamatan Bambanglipuro;
 - i. Perubahan Renja Kecamatan Kretek;
 - j. Perubahan Renja Kecamatan Pundong;
 - k. Perubahan Renja Kecamatan Sewon;
 - l. Perubahan Renja Kecamatan Jetis;
 - m. Perubahan Renja Kecamatan Imogiri;
 - n. Perubahan Renja Kecamatan Dlingo;
 - o. Perubahan Renja Kecamatan Pleret;
 - p. Perubahan Renja Kecamatan Banguntapan; dan
 - q. Perubahan Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal **26 OKTOBER 2018**


BUPATI BANTUL

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal **26 OKTOBER 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR **110**

LAMPIRAN XXIV

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Fungsi Renja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra).

Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 termasuk didalamnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019. Namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, perlu dilakukan perubahan terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 termasuk Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2019.

Dengan demikian, Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2019 ini digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai pedoman dalam menyusun RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Republik Indonesia*;
- e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019;
- f. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019; dan
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah menyesuaikan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 dengan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2019 adalah menyediakan dokumen pedoman dalam menyusun RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar Rp.3.568.550.400,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.3.357.005.891,00 atau sebesar 94.87%. Dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu sebesar 94.46%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 77.06%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja Persentase layanan perizinan dan nonperizinan menyerap anggaran paling besar yaitu 94.46% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat menyerap anggaran terkecil yaitu 77.06% dari target.

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 (lima) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 114.1% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2018) dengan pelaksanaan program/kegiatan serta upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik, maka peningkatan realisasi akan bisa dicapai.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPT dan
Pencapaian Renstra DPMPT s/d Tahun 2018
Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progr am (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/5)x100	(8)	(9)=(6+8)	(10)=(9/4x100)	
2		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2 12		Bidang Urusan Penanaman Modal								
2 12 01 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	95,62	95,62	100	100	
2 12 01 36		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah honor administrasi keuangan	108 ob	108 ob	108 ob	100	108	216	100
			Jumlah paket jasa kebersihan	12 ob	12 ob	12 ob	100	12 ob	24 ob	100
			Jumlah paket jasa komunikasi, internet	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	24 paket	100
			Jumlah pengadaan barang cetakan	12 paket	12 paket	1 2 paket	100	12 paket	24 paket	100
			Jumlah paket surat kabar dan majalah	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	24 paket	100
			Jumlah pengadaan ATK	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	24 paket	100
			Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	10 buah	10 buah	10 buah	100	10 buah	20 buah	100
			Jumlah paket komponen alat kebersihan	-	-	-	-	12 paket	12 paket	100
			Jumlah Perangko dan Materai	489 lbr	489 lbr	489 lbr	100	1204 lbr	1693 lbr	100
			Jumlah paket komponen alat listrik	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	24 paket	100
			Jumlah penggandaan	12 bl	12 bl	12 bl	100	66252 lbr	222258 lbr	100
			Jumlah paket servis perlengkapan kantor	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	24 paket	100
			Jumlah paket premi asuransi	-	-	-	-	12 ob	12 ob	100
2 12 01 37		Penyediaan Rapat-Rapat , Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah paket makanan minuman rapat (Makan rapat)	12 paket	12 paket	12 paket	100	950 oh	950 oh	100
			Jumlah paket makanan	12 paket	12 paket	12 paket	100	500 oh	500 oh	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/5)x100	(8)	(9)=(6+8)	(10)=(9/4x100)
		minuman rapat (snack rapat)							
		Jumlah paket makanan minuman tamu (Makan Tamu)	12 paket	12 paket	12 paket	100	300 oh	300 oh	100
		Jumlah paket makanan minuman tamu (Snack Tamu)	12 paket	12 paket	12 paket	100	200 oh	200 oh	100
		Jumlah pembelian Aqua gelas, Aqua gallon	12 bl	12 bl	12 bl	100	12 bl	12 bl	100
		Jumlah perjalanan ke luar daerah	19 oh	19 oh	19 oh	100	880 oh	880 oh	100
		Jumlah perjalanan ke dalam daerah	108 oh	108 oh	108 oh	100	880 oh	880 oh	100
2 12 01 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah paket jasa keamanan kantor	24 ob	24 ob	24 ob	100	24 ob	48 ob	100
		Jumlah paket premi asuransi petugas keamanan	-	-	-	-	24 ob	48 ob	100
		Jumlah paket ATK	-	-	-	-	12 paket	12 paket	100
2 12 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	92,68	92,68	100	100	92,68
2 12 02 51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pembelian Peralatan dan Perlengkapan kantor	7 unit	7 unit	6 unit	100	14 unit	20 unit	100
2 12 02 52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	100
2 12 02 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Opeasional	10 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	20 unit	100
2 12 02 54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	100
2 12 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100			100
2 12 05 18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	2 kegiatan	100
2 12 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100			100
2 12 06 17	Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah laporan kinerja	48 dok	48 dok	48 dok	100	48 dok	96 dok	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/5)x100	(8)	(9)=(6+8)	(10)=(9/4x100)
				Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	OPD,realisasi fisik triwulanan						
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor yang berinvestasi	8	8	100	8	16	100
2	12	15	18	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Jumlah kegiatan temu bisnis	2 kali	2 kali	100	1 kali	3 kali	100
2	12	15	19	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	4 kali	4 kali	100	3 kali	7 kali	100
2	12	15	20	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pengembangan potensi penanaman modal	3 kali	3 kali	100	3 kali	6 kali	100
2	12	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase realisasi investasi	8	8	100	8	16	100
2	12	16	16	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menjadi obyek pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	60	60	100	75	145	100
2	12	16	18	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kajian penanaman modal	2 dok	2 dok	100	3 dok	5 dok	100
4				URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	07			Bidang Fungsi Lainnya							
4	07	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi	Aplikasi SIM Pelayanan On Line Perizinan dan Nonperizinan	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
4	07	23	01	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah paket pembuatan Sistem Informasi	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
4	07	28		Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai standar mutu			100			100
4	07	28	11	Pendampingan Pelaksanaan Standar Manajemen Mutu	Jumlah paket pendampingan pelayanan sesuai standar mutu	2 keg	2 keg	100	5 keg	7 keg	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progr am (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6/5)x100	(8)	(9)=(6+8)	(10)=(9/4x100)
4 07 31	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi, Cakupan penetapan pelayanan perizinan, Cakupan penyelesaian permasalahan perizinan, Persentase penyelesaian pelayanan perizinan sesuai SOP Capaian nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat		90	93.92	93.92	100	90	93.92
4 07 31 02	Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	Jumlah peserta sosialisasi	450 org	450 org	450 org	100	600 org	1050 org	100
4 07 31 04	Operasional Pelayanan Perizinan	Jumlah paket komponen operasional pelayanan Perizinan	12 paket	12 paket	12 paket	100	12 paket	24 paket	100
4 07 31 05	Pendataan dan Penetapan Perizinan	Jumlah perizinan terbit dalam satu tahun	7000	7000	6163	99.97	6000	12163	100
4 07 31 06	Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perizinan	Persentase Penanganan pengaduan	90	90	90	90	90	90	90
4 07 31 07	Pengkajian Peraturan Daerah tentang Perizinan	Jumlah kajian tentang Peraturan Pemerintah tentang perizinan	1 perda	1 perda	1 perda	100	2 perda	2 perda	100
4 07 31 10	Pengelolaan Perizinan On Line	Jumlah paket pengelolaan online	12 bl	12 bl	12 bl	100	1 paket	1 paket	100
4 07 31 13	Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	2 kali	2 kali	2 kali	100	2 kali	4 kali	100
4 07 31 15	Peningkatan Kualitas SDM Customer Services Pelayanan Perizinan	Jumlah honor SDM Customer Servis perijinan	77 ob	77 ob	77 ob	100	-	77 ob	100
4 07 31 16	Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	Jumlah pelaksanaan pameran bantul ekspo	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	2 kali	100
4 07 31 17	Lokakarya Penanganan Pengaduan	Jumlah peserta loka karya	75 org	75 org	75 org	100	70 org	145 org	100
4 07 31 24	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit	400 izin	400 izin	376 izin	100	200 izin	576 izin	100
4 07 31 25	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah peserta loka karya	-	-	-	-	70 org	70 org	100

2.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2017 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan Tahun 2017 adalah 77, realisasi sebesar 70.98, tercapai 92.1% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 81.60 atau tercapai sebesar 108,8%, maka capaian tahun 2017 menurun sebesar 27.2%.

Sedangkan realisasi capaian sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh data bahwa mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori “sangat baik”, karena diperoleh nilai IKM unit pelayanan sebesar 83,08. Skor ini mengalami peningkatan dari periode lalu yang mencapai nilai 81,03. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu termasuk dalam kategori “sangat baik” karena berada pada kisaran nilai 81,26 - 100.

Realisasi capaian kinerja selanjutnya terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi bahwa pada tahun 2017 pertumbuhan nilai investasi ditargetkan sebesar Rp.95.924.128.041,86 dan nilai capaian realisasi di tahun 2017 mencapai Rp.183.334.086.687,60. Jika dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2016 yang mencapai Rp.142.143.455.561,11 terjadi kenaikan sebesar Rp.41.190.631.126,49. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 8.6%, realisasi sebesar 12.72%.

Kajian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tersusun dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
1	Persentase Layanan Perizinan dan Nonperizinan Tepat Waktu	77	79	81	83	85	70.98	79	81	83	85	Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 77, realisasi sebesar 70.98, tercapai 92.1%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 81.60 atau tercapai sebesar 108,8%, maka capaian tahun 2017 menurun sebesar 27.2%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 85 %. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 83.5%% dari target akhir Renstra tahun 2021
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5	79	79,5	80	80,5	83,08	79	79,5	80	80,5	Mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori “sangat baik”, karena diperoleh nilai IKM unit pelayanan sebesar 83,08. Skor ini mengalami peningkatan dari periode lalu yang mencapai nilai 81,03. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu termasuk dalam kategori “sangat baik” karena berada pada kisaran nilai 81,26 - 100.
3	Pertumbuhan Investasi	8,6	8,08	8,09	9	9,05	12,72	8,08	8,09	9	9,05	Realisasi melebihi target. Realisasi sampai dengan tahun 2017 mencapai 183.334.086.687,60. Terjadi kenaikan sebesar 41.190.631.126,49 jika dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2016 yang mencapai 142.143.455.561,11 Catatan: Realisasi investasi pada tahun 2017 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situs https://lkpmonline.bkpm.go.id

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Perkembangan lingkungan strategis organisasi berkembang pesat dan cepat. Kemajuan teknologi informasi mendorong percepatan perubahan lingkungan organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan permasalahan organisasi semakin kompleks. Demikian halnya yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu meliputi peluang dan tantangan.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- 1) Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, sehingga menegaskan kewenangan Pembantuan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- 2) Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 123 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- 3) Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 4) Implementasi Standar Manajemen Mutu;
- 5) Adanya motivasi belajar aparatur yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- 1) Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana;
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.
- 3) Belum tersosialisasikannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai OPD baru di lingkungan Pemkab Bantul;
Tersosialisasinya keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan lebih memudahkan masyarakat umum dan investor dalam kaitannya dengan investasi dan pengurusan perizinan yang mereka perlukan.

c. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Adanya penerapan nyata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah memberikan peluang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima, Integritas dan Profesional.
- 2) Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan publik. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersebut.

- 3) Tingginya minat investor untuk berinvestasi di Bantul;
Tingginya minat investor untuk melakukan kegiatan usaha di Bantul akan mendorong aparat untuk memberikan pelayanan prima kepada public dalam hal berinvestasi serta pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bantul.
- 4) Tersedianya kesempatan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis PTSP yang diselenggarakan oleh BKPM RI;
- 5) Upaya deregulasi pelayanan penanaman modal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota menegaskan, bahwa PTSP yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal. Ketentuan ini tentu saja perlu ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota untuk melakukan deregulasi penanaman modal. Regulasi daerah yang selama ini berlaku sebagai acuan pelayanan penanaman modal harus segera disesuaikan.
Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul perlu ditindaklanjuti dengan regulasi pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

d. Faktor Tantangan Organisasi

- 1) Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- 2) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima;
Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi hal yang harus dilakukan;
- 3) Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus izin itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

Dengan memperhatikan faktor kelemahan organisasi dan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan

organisasi dan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan melaksanakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Mengirimkan aparat untuk mengikuti Diklat Teknis PTSP yang diselenggarakan oleh BKPM;
2. Mengimplementasikan Pelayanan Perizinan On Line;
3. Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit;
4. Menginisiasi regulasi pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada PTSP;
5. Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah melalui berbagai media promosi, seperti:
liflet, brosur, infografi, siaran radio, surat kabar dan juga temu langsung dengan masyarakat pelaku usaha, dll;
6. Mengoptimalkan sosialisasi pengelolaan perizinan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat perizinan dan mekanisme pengurusannya;
7. Mengoptimalkan implementasi Standar Manajemen Mutu dalam penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan pelayanan prima di bidang penanaman modal

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan proses yang dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Untuk membandingkan rancangan awal RKPD Tahun 2019 dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2019, disajikan tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Bantul

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	1.284.452.660	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	943.330.200	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			256.298.660	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul			335.667.700	
			Jumlah honor administrasi keuangan	108 ob	36.078.240			Jumlah honor administrasi keuangan	108 ob	36.078.240	
			Jumlah paket jasa komunikasi, internet	12 bulan	17.409.480			Jumlah paket jasa komunikasi, internet	12 bulan	17.409.480	
			Jumlah pengadaan barang cetakan	12 paket	11.000.000			Jumlah pengadaan barang cetakan	12 paket	11.000.000	
			Jumlah paket surat kabar	12 bulan	6.996.000			Jumlah paket surat kabar	12 bulan	6.996.000	
			Jumlah pengadaan ATK	12 bulan	38.824.500			Jumlah pengadaan ATK	12 bulan	38.824.500	
			Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	12 unit	90.450.000			Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	12 unit	90.450.000	
			Jumlah paket komponen alat kebersihan	12 paket	18.051.000			Jumlah paket komponen alat kebersihan	12 paket	18.051.000	
			Jumlah perangko dan materai	1444 lembar	8.664.000			Jumlah perangko dan materai	1444 lembar	8.664.000	
			Jumlah paket komponen alat listrik	12 paket	14.250.000			Jumlah paket komponen alat listrik	12 paket	14.250.000	
			Jumlah penggandaan	72.877 lembar	14.575.440			Jumlah penggandaan	72.877 lembar	14.575.440	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul			705.974.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul			705.974.000	
			Jumlah perjalanan ke luar daerah	880 oh	456.174.000			Jumlah perjalanan ke luar daerah	880 oh	456.174.000	
			Jumlah perjalanan ke dalam daerah	880 oh	212.150.000			Jumlah perjalanan ke dalam daerah	880 oh	212.150.000	
			Jumlah pembelian aqua	388 galon	6.600.000			Jumlah pembelian aqua	388 galon	6.600.000	
			Jumlah paket makan minum rapat	1.060,00	19.150.000			Jumlah paket makan minum rapat	1.060,00	19.150.000	
			Jumlah paket makan minum tamu	600	11.900.000			Jumlah paket makan minum tamu	600	11.900.000	
	Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul			322.180.000	Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul			322.180.000	
			Jumlah honor SDM CS Perizinan	120 ob	217.800.000			Jumlah honor SDM CS Perizinan	120 ob	217.800.000	
			Jumlah paket jasa keamanan kantor	24 ob	40.800.000			Jumlah paket jasa keamanan kantor	24 ob	40.800.000	
			Jumlah paket premi BPJS petugas keamanan	24 ob	3.120.000			Jumlah paket premi BPJS petugas keamanan	24 ob	3.120.000	
			Jumlah tim Penyediaan Barang Jasa	3 ok	900.000			Jumlah tim Penyediaan Barang Jasa	3 ok	900.000	
			Jumlah pembayaran jasa kebersihan	12 ob	20.400.000			Jumlah pembayaran jasa kebersihan	12 ob	20.400.000	
			Jumlah paket premi BPJS SDM CS Perijinan	120 ob	15.600.000			Jumlah paket premi BPJS SDM CS Perijinan	120 ob	15.600.000	
			Jumlah paket premi BPJS tenaga kebersihan	12 ob	1.560.000			Jumlah paket premi BPJS tenaga kebersihan	12 ob	1.560.000	
			Jumlah pakaian kerja pelayanan	55 unit	22.000.000			Jumlah pakaian kerja pelayanan	55 unit	22.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	6.214.200.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	6.214.200.000	
	Pembangunan gedung kantor		Jumlah gedung yang terbangun	1 unit	4.700.000.000			Jumlah gedung yang terbangun	1 unit	4.700.000.000	
	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional (roda 4 sebanyak 1 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 5 unit)	6 unit	950.000.000			Jumlah kendaraan dinas/operasional (roda 4 sebanyak 1 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 5 unit)	6 unit	950.000.000	
	Peningkatan Daya Listrik		Jumlah paket jasa penambahan daya listrik	1 paket	7.000.000			Jumlah paket jasa penambahan daya listrik	1 paket	7.000.000	
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah rehab gedung kantor	4 unit	80.000.000			Jumlah rehab gedung kantor	4 unit	80.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 paket	75.000.000			Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 paket	75.000.000	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah pembelian komponen material pemeliharaan gedung	12 paket	30.000.000			Jumlah pembelian komponen material pemeliharaan gedung	12 paket	30.000.000	
			Jumlah jasa tukang	140 orang hari	11.200.000			Jumlah jasa tukang	140 orang hari	11.200.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah pembelian BBM dan pelumas	20.550,00 liter	268.000.000			Jumlah pembelian BBM dan pelumas	20.550,00 liter	268.000.000	
			Jumlah servis kendaraan dinas	17 unit	26.000.000			Jumlah servis kendaraan dinas	17 unit	26.000.000	
			Jumlah penggantian suku cadang	17 unit	25.000.000			Jumlah penggantian suku cadang	17 unit	25.000.000	
			Jumlah pengecatan mobil dinas	2 unit	22.000.000			Jumlah pengecatan mobil dinas	2 unit	22.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	20.000.000			Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	20.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	86.200.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100	86.200.000	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur	65 orang	110.000.000	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur	65 orang	110.000.000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kab. Bantul	Persentase Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	149.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kab. Bantul	Persentase Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	149.000.000	
	Penyusunan sistem manajemen mutu	Kab. Bantul	1.Terlaksananya kegiatan pendampingan2.Tersedianya dokumen ISO 3. Terlaksananya audit internal 4. Terlaksananya rapat tinjauan manajemen5. Terlaksananya uji eksternal ISO	5 kegiatan	131.000.000	Penyusunan sistem manajemen mutu	Kab. Bantul	1.Terlaksananya kegiatan pendampingan2.Tersedianya dokumen ISO 3. Terlaksananya audit internal 4. Terlaksananya rapat tinjauan manajemen5. Terlaksananya uji eksternal ISO	5 kegiatan	131.000.000	
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 kali	5.500.000	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 kali	5.500.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan laporan	12 bulan	12.500.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan laporan	12 bulan	12.500.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kab. Bantul	Jumlah investor	8	643.857.920	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kab. Bantul	Jumlah investor	8	643.857.920	
	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal		Jumlah kegiatan temu bisnis	2 kali	40.532.800	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan temu bisnis	2 kali	40.532.800	
	Peningkatan Promosi Penanaman Modal		Jumlah kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 kali	300.750.120	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 kali	300.750.120	
	Pengembangan Potensi Penanaman Modal		Jumlah media pengembangan potensi penanaman modal	3 paket	302.575.000	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah media pengembangan potensi penanaman modal	3 paket	302.575.000	
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kab. Bantul	Persentase realisasi investasi	8	162.732.800	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kab. Bantul	Persentase realisasi investasi	8	162.732.800	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menjadi obyek pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	120	64.732.800	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menjadi obyek pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	120	64.732.800	
						Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Kab. Bantul	Jumlah kajian penanaman modal	3 dokumen	98.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kab. Bantul	Aplikasi SIM Pelayanan On Line Perizinan dan Nonperizinan	1	372.875.000	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kab. Bantul	Aplikasi SIM Pelayanan On Line Perizinan dan Nonperizinan	1	372.875.000	
	Penyusunan Sisteim Informasi terhadap Layanan Publik		Jumlah paket pembuatan Sistem Informasi	1	372.875.000	Penyusunan Sisteim Informasi terhadap Layanan Publik	Kab. Bantul	Jumlah paket pembuatan Sistem Informasi	1	372.875.000	
8	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi, Cakupan penetapan pelayanan perizinan, Cakupan penyelesaian permasalahan perizinan, Persentase penyelesaian pelayanan perizinan sesuai SOP Capaian nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat		930.000.000	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi, Cakupan penetapan pelayanan perizinan, Cakupan penyelesaian permasalahan perizinan, Persentase penyelesaian pelayanan perizinan sesuai SOP Capaian nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat		930.000.000	
	Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	10 kali	270.000.000	Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	Kab. Bantul	10 kali	270.000.000	10	
	Operasional Pelayanan Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah barang cetakan pelayanan perizinan	7 jenis	70.000.000	Operasional Pelayanan Perizinan	Kab. Bantul	7 jenis	70.000.000	7	
	Pendataan dan Penetapan Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	6.000 izin	115.000.000	Pendataan dan Penetapan Perizinan	Kab. Bantul	6.000 izin	115.000.000	6.000,00	
	Penyelesaian pengaduan dan Wasdal Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah persentase penanganan pengaduan yang tertangani	100 persen	15.000.000	Penyelesaian pengaduan dan Wasdal Perizinan	Kab. Bantul	100 persen	15.000.000	100	
	Pengkajian Perda tentang	Kab.	Jumlah kajian peraturan	2 perda	85.000.000	Pengkajian Perda	Kab.	Jumlah kajian peraturan	2 perda	85.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perizinan	Bantul	daerah tentang perizinan dan penanaman modal			tentang Perizinan	Bantul	daerah tentang perizinan dan penanaman modal			
	Pengelolaan Perizinan On Line	Kab. Bantul	Jumlah paket pengelolaan perizinan on line	1 paket	200.000.000	Pengelolaan Perizinan On Line	Kab. Bantul	Jumlah paket pengelolaan perizinan on line	1 paket	200.000.000	
	Survei Kepuasan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	2 kali	8.000.000	Survei Kepuasan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	2 kali	8.000.000	
	Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan pameran bantul ekspo	1 kali	32.000.000	Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan pameran bantul ekspo	1 kali	32.000.000	
	Lokakarya Penanganan Pengaduan	Kab. Bantul	Jumlah lokakarya penanganan pengaduan	1 kali	30.000.000	Lokakarya Penanganan Pengaduan	Kab. Bantul	Jumlah lokakarya penanganan pengaduan	1 kali	30.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit	5.400 izin	50.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit	5.400 izin	50.000.000	
	Lokakarya Wasdal Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan lokakarya	1 kali	55.000.000	Lokakarya Wasdal Perizinan	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan lokakarya	1 kali	55.000.000	
					9.867.118.380					9.867.118.380	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Kecamatan Tahun 2018 untuk membahas program dan kegiatan yang dibutuhkan di Tahun 2019, telah dilaksanakan pada tanggal 12 - 21 Februari 2018. Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Bantul.

Namun demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Bantul telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin yang salah satu sasaran kegiatannya adalah kecamatan se-Kabupaten Bantul, yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan dengan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Perizinan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019 Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	-	-	-	-

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah merumuskan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, yaitu: "Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas". Dengan perumusan tema tersebut, Pemerintah telah menetapkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas. Prioritas Nasional yang keempat adalah Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, yang salah satu Program Prioritasnya: Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.

Upaya yang dilakukan BKPM RI dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal antara lain:

- a. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
- b. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- c. Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan *online tracking system*. Jenis perizinan yang telah dapat dilayani melalui SPIPISE adalah: Izin Prinsip, Izin Usaha dan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Barang Modal dan Bahan Baku. Hingga akhir tahun 2014, jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah menyelenggarakan PTSP sebanyak 493 PTSP dan 343 PTSP diantaranya telah menerapkan SPIPISE.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja

Sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, Visi Kabupaten Bantul dijabarkan ke dalam 5 Misi Kabupaten. Misi Kabupaten Bantul yang pertama adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien Dan Bebas Dari KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi dan Misi Kabupaten Bantul yang ketiga adalah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan Pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan. Kedua Misi Kabupaten inilah yang menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Guna menopang Misi pertama Kabupaten Bantul, yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien Dan Bebas Dari KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menyelenggarakan layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelaksanaan layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan sesuai SOP ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Guna mengetahui sejauh mana kinerja instansi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selalu melakukan survey kepuasan masyarakat. Salah satu survey kepuasan masyarakat yang secara rutin dilaksanakan adalah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dengan layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan sesuai SOP, merupakan dukungan dalam upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi daerah di Kabupaten Bantul. Hal ini tentu saja akan menopang Misi ketiga Kabupaten Bantul, yakni Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Difokuskan Pada Percepatan Pengembangan Perekonomian Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang merupakan rencana

tahunan, dirumuskan untuk melaksanakan Misi Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan fungsi instansi. Secara lebih detil, keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Misi Kabupaten dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Keterkaitan Tujuan dan Sasaaran DPMPT dengan Kebijakan Kabupaten

Misi Kabupaten	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja DPMPT
Misi 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang berkualitas	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	1.Meningkatka n kualitas SDM birokrasi; 2.Mengemba ngkan layanan birokrasi yang prima.	1.Presentase Layanan Perizinan dan Nonperizinan tepat waktu 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Misi 3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas	Peningkatan daya saing produk daerah	Meningkatkan iklim dan kualitas pelayanan investasi	Pertumbuhan Investasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada dasarnya seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Bantul. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul Tahun 2019 terdiri dari 8 (delapan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.271.898.188,- (Empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)

Rincian Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul Tahun 2019 beserta pagu anggarannya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
021201	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU				4,271,898,188.00	4,463,191,158.95		
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				3,634,300,613.00	3,797,042,357.07		
0212	PENANAMAN MODAL				3,634,300,613.00	3,797,042,357.07		
0212.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian nilai AKIP	84 Angka	1,679,776,153.00	1,754,995,495.01		
0212.021201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah honor administrasi keuangan Jumlah tagihan jasa komunikasi dan internet Jumlah jenis barang persediaan ATK Jumlah macam barang persediaan bahan Cetak Jumlah jenis barang persediaan alat listrik Jumlah barang persediaan materai Jumlah macam barang persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih Jumlah jenis barang persediaan bendera Jumlah paket surat kabar Jumlah pajak STNK kendaraan dinas Jumlah penggandaan/fotokopi	108 orang bulan 12 bulan 57 jenis 9 macam 12 jenis 1032 lembar 25 macam 6 jenis 12 bulan 17 unit 319695 lembar	592,351,153.00	618,876,272.96		P1
0212.021201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah perjalanan Dinas keluar daerah Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah Jumlah pembelian Aqua	880 oh 1440 oh 388 galon	656,260,000.00	685,646,918.79		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah paket makan/minum rapat Jumlah paket makan/minum tamu	1410 orang 1271 orang				
0212.021201.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah honor SDM CS Perizinan Jumlah paket jasa keamanan kantor Jumlah paket premi BPJS petugas keamanan Jumlah tim Penyediaan Barang Jasa Jumlah pembayaran jasa kebersihan Jumlah paket premi BPJS SDM CS Perijinan Jumlah paket premi BPJS tenaga kebersihan Jumlah pakaian kerja pelayanan	150 orang bulan 24 orang bulan 24 orang bulan 3 orang kegiatan 12 orang bulan 150 orang bulan 12 orang bulan 55 unit	431,165,000.00	450,472,303.26		P1
0212.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	98 Persen	1,122,599,460.00	1,172,868,772.71		
0212.021201.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah unit pengadaan alat kantor	202 unit	741,921,460.00	775,144,246.23		P1
0212.021201.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah pembelian komponen material pemeliharaan gedung	1 unit	48,198,000.00	50,356,276.77		P1
0212.021201.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Jumlah pembelian BBM Jumlah service kendaraan dinas Jumlah penggantian suku cadang Jumlah pengecatan mobil dinas	15500 liter 1 unit 11 unit 5 unit	312,500,000.00	326,493,557.62		P1
0212.021201.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	126 unit	19,980,000.00	20,874,692.10		P1
0212.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	98,275,000.00	102,675,694.00		
0212.021201.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur	65 orang	98,275,000.00	102,675,694.00		P1
0212.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian nilai evaluasi kinerja	82 Angka	113,500,000.00	118,582,460.13		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0212.021201.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu	Kabupaten Bantul	Jumlah pertemuan pendampingan Jumlah dokumen ISO Jumlah audit internal Jumlah rapat tinjauan manajemen Jumlah uji eksternal ISO	10 kali 7 dokumen 2 kali 2 kali 1 kali	103,000,000.00	107,612,276.59		P1
0212.021201.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kabupaten Bantul	Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 kali	6,000,000.00	6,268,676.31		P1
0212.021201.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Jumlah penyusunan laporan perencanaan dan pelaporan	48 dokumen	4,500,000.00	4,701,507.23		P1
0212.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI		Jumlah investor yang berinvestasi	10 investor	479,600,000.00	501,076,192.74		
0212.021201.15.018	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Jumlah Temu Bisnis dan Kajian Kemitraan	2 kali temu bisnis dan 1 kajian	68,200,000.00	71,253,954.01		P1
0212.021201.15.019	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa	Jumlah kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 kali promosi dan 1 kajian	211,100,000.00	220,552,928.04		P1
0212.021201.15.020	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Jumlah Media Pengembangan Potensi Penanaman Modal	4 media	200,300,000.00	209,269,310.69		P1
0212.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI		Persentase Realisasi Investasi	9.25 Persentase	140,550,000.00	146,843,742.47		
0212.021201.16.016	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Jumlah Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Perusahaan PMDN/PMA	60 kali	50,650,000.00	52,918,075.82		P1
0212.021201.16.018	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Terlaksananya Koordinasi Penanaman Modal dan Kajian Penanaman Modal	2 Kali Koordinasi dan 1 Kajian	89,900,000.00	93,925,666.65		P1
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				637,597,575.00	666,148,801.88		
0407	FUNGSI LAINNYA				637,597,575.00	666,148,801.88		
0407.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI		Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100 Persen	105,400,000.00	110,119,747.11		
0407.021201.23.001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Kabupaten Bantul	Jumlah paketan pembuatan sistem informasi	1 aplikasi	105,400,000.00	110,119,747.11		P1
0407.31	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIJINAN		cakupan penetapan pelayanan perizinan	100 Persen	532,197,575.00	556,029,054.77		

Kode 1	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan 2	Lokasi 3	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif 6	Prakiraan Maju 7	Jenis Kegiatan 8	Prioritas 9
			Tolok Ukur 4	Target 5				
0407.021201.31.002	Sosialisasi pengelolaan perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	52 kali	306,275,000.00	319,989,805.95		P1
0407.021201.31.004	Operasional pelayanan perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah barang cetakan pelayanan perizinan	7 jenis	6,000,000.00	6,268,676.31		P1
0407.021201.31.005	Pendataan dan penetapan perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	6000 izin	13,325,000.00	13,921,685.30		P1
0407.021201.31.006	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah presentase penanganan pengaduan yang tertangani	100 persen	8,250,000.00	8,619,429.92		P1
0407.021201.31.007	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah kajian peraturan daerah tentang perizinan dan penanaman modal	2 regulasi	38,150,000.00	39,858,333.51		P1
0407.021201.31.010	Pengelolaan perijinan online	Kabupaten Bantul	Jumlah paket pengelolaan perizinan online	2 kali	32,300,000.00	33,746,374.12		P1
0407.021201.31.013	Survei kepuasan masyarakat	Kabupaten Bantul	Jumlah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	2 kali	4,200,000.00	4,388,073.41		P1
0407.021201.31.016	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaksanaan bantul ekspo	1 kali	32,780,000.00	34,247,868.22		P1
0407.021201.31.017	Lokakarya penanganan pengaduan	Kabupaten Bantul	Jumlah lokakarya penanganan pengaduan	1 kali	26,248,867.00	27,424,275.10		P1
0407.021201.31.024	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit	400 izin	4,000,000.00	4,179,117.54		P1
0407.021201.31.025	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Kabupaten Bantul	Jumlah lokakarya pengawasan dan pengendalian perizinan	1 kali	60,668,708.00	63,385,415.39		P1

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah periode Tahun 2019 yang disusun dalam rangka menyesuaikan program/kegiatan dan target kinerja yang diatur di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Selain itu, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 ini akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2019. Selain itu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2019. Evaluasi terhadap hasil Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.


BUPATI BANTUL

SUHARSONO